

# Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKPK Tahun 2023

BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN  
2023

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, mengamanatkan Renstra sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, di tingkat Eselon I Renstra Kementerian Kesehatan dijabarkan dalam dokumen lima tahunan Rencana Aksi Program (RAP) BKPK dan dokumen tahunan RKT BKPK.

RKT tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023. Diharapkan dengan adanya dokumen rencana kerja tahunan ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT BKPK Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2023

**Kepala**

**Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'S' and 'L' intertwined.

**Syarifah Liza Munira**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
C. HASIL EVALUASI TAHUN 2022.....	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020-2024.....	9
A. TUGAS DAN FUNGSI .....	9
B. TUJUAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN .....	9
C. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN .....	10
D. ARAHAN DAN STRATEGIS NASIONAL .....	11
E. SASARAN STRATEGIS BKPK.....	13
BAB III PERENCANAAN TAHUN 2023 .....	18
A. KERANGKA PENDANAAN.....	18
B. PAGU INDIKATIF .....	28
C. PAGU ALOKASI.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN KRISNA RENJA BKPK 2023	
DAFTAR KONTRIBUTOR	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.....	10
Tabel.2Target dan Alokasi Anggaran BKPK Tahun 2022-2024 .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Struktur Organisasi BKPK.....	9
----------------------------------------	---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga; Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat BKPK (BKPK) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat BKPK tahun 2020 – 2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

RKT memuat langkah-langkah untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, dokumen RKT juga menjadi tolak ukur pencapaian akuntabilitas kinerja instansi melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target indikator kinerja kegiatan (IKK).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPK menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan analisis pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan administrasi Badan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen BKPK Tahun 2023, dan
3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Rencana Kerja Tahunan BKPK merupakan penjabaran Rencana Aksi Program BKPK dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun 2023. Dengan adanya dokumen RKT ini diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

## C. HASIL EVALUASI TAHUN 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Hal ini berdampak juga pada perubahan tugas dan fungsi Organisasi, yang berakibat pada perubahan Program dan Kegiatan secara menyeluruh.

Penyesuaian Target IKP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang tercantum pada dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 diturunkan menjadi indikator program dalam revisi PK 2022. Capaian kinerja IKP BKPK tahun 2022 terdiri dari 3 Program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang terdiri atas 3 indikator, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas 4 indikator dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri atas 2 indikator. Secara umum dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel Error! No text of specified style in document..2 Target dan Capaian Kinerja BKPK Tahun 2022**

Sasaran Program	Indikator	2022		
		Target	Capaian	%
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	1. Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan	30	47,1	>120

Sasaran Program	Indikator	2022		
		Target	Capaian	%
	2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	25	39,3	>120
	3. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	25	42,5	>120
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	4. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	100	100
	5. Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	1	1	100
	6. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	20	9,67	48,35
	7. Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	1	100
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	8. Nilai Reformasi Birokrasi	94	87,50	93,08
	9. Nilai Kinerja Anggaran	90	95,53	106,14

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil penilaian kinerja tahun 2022 Indikator Kegiatan Program (IKP) memiliki sembilan indikator yang terdiri atas indikator Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan dengan capaian 47,1 (>120%), Indikator kedua adalah Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM dengan capaian

39,3 (>120%). Indikator ketiga, Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan dengan capaian 42,5 (>120%). Indikator keempat, Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien tercapai 100 (100%). Indikator ke lima Jumlah pedoman dalam Menyusun kebijakan dengan capaian 1 Pedoman (100%). Indikator ke enam Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti tidak tercapai sesuai target, capaian 9,67 (48,35%) hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah transformasi Badan Litbangkes menjadi BKPK baru ditetapkan sehingga secara efektif pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di BKPK dimulai pada akhir bulan Juli tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan perhitungan output jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan berdasarkan kajian/ rekomendasi / evidence based dari BKPK belum sejalan dengan indikator yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes pada tahun 2021 Indikator ke tujuh adalah terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif dengan capaian 1 dokumen (100%). Dua indikator dari program dukungan manajemen hasilnya merupakan capaian output bersama (Seluruh Kementerian Kesehatan) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 87.50 (93,08%) dan Indikator Nilai Kinerja Anggaran 95,53 (106,14%).

## BAB II ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020-2024

### A. TUGAS DAN FUNGSI

Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.



Gambar.1 Struktur Organisasi BKPK

### B. TUJUAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh

4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

### C. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif

Tujuan		Sasaran Strategis	
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

#### D. ARAHAN DAN STRATEGIS NASIONAL

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu "Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan

kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
5. Revolusi Mental Menuju *Smart ASN*

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan BKPK adalah:

1. Kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti, baik berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pengkajian kesehatan, juga berdasarkan data informasi lain yang relevan.

2. Kebijakan pembangunan kesehatan mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sektor lain (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah.
3. Harmonisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah untuk mendorong mengoptimalkan dana fungsi kesehatan dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

#### Strategi BKPK:

1. Mengembangkan landscape kebijakan kesehatan : kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, kebijakan Kementerian dan Lembaga, serta pemerintah daerah.
2. Penyusunan kebijakan mengacu kepada RPJMN, Renstra dan sasaran prioritas pembangunan Kesehatan.
3. Menyusun pedoman dan instrumen kebijakan pembangunan kesehatan; standar proses membuat kebijakan, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, monitoring proses kebijakan.
4. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti, agar kebijakan yang dihasilkan lebih efisien dan efektif.
5. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan
6. Melakukan pendampingan dalam perumusan kebijakan kesehatan
7. Mendorong integrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan kesehatan di pusat dan daerah.
8. Evaluasi kebijakan pembangunan Kesehatan.

## E. SASARAN STRATEGIS BKPK

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kemenkes, dalam kebijakan tersebut ditetapkan BKPK sebagai organisasi yang merupakan unit utama di lingkungan Kemenkes. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, Badan Litbangkes bertransformasi menjadi BKPK yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, BKPK melaksanakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan
2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan
3. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan
5. pelaksanaan administrasi Badan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai dokumen Renstra Revisi Tahun 2020-2024, BKPK melaksanakan 4 Sasaran Strategis, yaitu:

- a. Sasaran Strategis: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
  1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
  2. Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN  
Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC  
IKP:
    - 1) Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
    - 2) Kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
  3. Kegiatan: Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Sasaran kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan.  
Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan  
IKK:
    - 3) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
    - 4) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN
    - 5) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)
    - 6) Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni
    - 7) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
    - 8) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
    - 9) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit
- b. Sasaran Strategis: Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
  1. Indikator Sasaran Strategis: Proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan
  2. Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN  
Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC  
IKP:
    - 1) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
  3. Kegiatan: Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sasaran kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

IKK:

- 1) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
- 2) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
- 3) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit

c. Sasaran Strategis: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti

1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

2. Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Program: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti

IKP:

- 1) Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
- 2) Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
- 3) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
- 4) Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif

3. Kegiatan:

1) Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan

Sasaran kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan Kesehatan

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

- 1) Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1)
- 2) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi
- 3) Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya

2) Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

Sasaran kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

Pelaksana: Sekretariat BKPK

Indikator:

1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman

3) Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan

Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti

Pelaksana: Pusjak Upaya Kesehatan

- 1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti

- 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan
  - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan
- 4) Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
 Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berbasis bukti  
 Pelaksana: Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan  
 Indikator:
- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
  - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan
- 5) Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan  
 Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan berbasis bukti  
 Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan  
 Indikator:
- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
  - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan
- 6) Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
 Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti  
 Pelaksana: Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan  
 Indikator:
- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
  - 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti

- 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi Kesehatan
- 6) Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga
- 7) Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan

d. Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

1. Indikator Sasaran Strategis: Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

2. Program: Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

IKP:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai Kinerja Anggaran

3. Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pelaksana: Sekretariat BKPK

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kegiatan ini merupakan dukungan BKPK, sekaligus menggambarkan crosscutting terhadap IKP Nilai RB dan NKA lingkup Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

### BAB III PERENCANAAN TAHUN 2023

#### A. KERANGKA PENDANAAN

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan meliputi pelaksanaan penyusunan kebijakan berbasis bukti, baik berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pengkajian kesehatan, juga berdasarkan data informasi lain yang relevan mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sektor lain (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah. dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan, diperlukan harmonisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah untuk mendorong mengoptimalkan dana fungsi kesehatan dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan. Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian program Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022-2024 terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel.2 Target dan Alokasi Anggaran BKPK Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
III	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN						55.481.156	56.355.900	Ditjen Yankes, Ditjen Farmalkes, Ditjen Nakes, Ditjen Kesmas, BKPK dan Setjen
P	Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC								Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	30	60	100					
2	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	25	50	75					
3	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	25	50	100					
1 3	Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan					24.892	26.136	27.443	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
a	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	Pusat dan daerah							
1	) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan *(III.P.1)		30	60	100				
2	) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN *(III.P.1)		10	12	15				
3	) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District		50	75	100				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Health Account (PHA/DHA) *(III.P.2)								
4	Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni *(III.P.2)		50	75	100				
5	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan *(III.P.3)		50	75	100				
6	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas *(III.P.3)		50	75	100				
7	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit *(III.P.3)		50	75	100				
V	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan					97.511	102.386	88.405	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan								Badan Kebijakan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
A	kesehatan berbasis bukti								Pembangunan Kesehatan
1	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien		100	100	100				
2	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan		1						
3	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti		20	40	100				
4	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif		1	1	1				
1	Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan					43.324	45.490	47.765	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
a	Sasaran kegiatan Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Pusat							
1	Persentase implementasi penyusunan ) kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman *(V.A.2)		10	90	100				
2	Kegiatan Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan					132.830	138.422	145.343	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti	Pusat dan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
		daerah							
	1 ) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	2 ) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	3 ) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	4 ) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan*(V.A.3)		50	80	100				
	5 ) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		25	50	100				
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan					465.809	489.099	513.554	Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
a	Sasaran Kegiatan : Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	Pusat								
	1 ) <i>Annual review</i> tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1) *(V.A.1)		2	2	2					
	2 ) <i>Annual utilization review</i> untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi *(V.A.1)		20	20	20					
	3 ) <i>Annual review</i> terhadap HTA dan rencana implementasinya *(V.A.1)		1	1	1					
	b	Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti	Pusat							
		1 ) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
		2 ) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
3 ) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)			50	75	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Pusat							
1	) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
2	) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
3	) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
4	) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan *(V.A.3)		50	80	100				
5	) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		25	50	100				
4	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Pembiayaan Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan					17.326	18.192	19.102	Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	5 ) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		25	50	100				
5	Kegiatan Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan					36.861	38.704	40.640	Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan berbasis bukti	Pusat							
1	) Tersusunnya blueprint pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga *(V.A.4)		1	1	1				
2	) Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan *(V.A.4)		10	10	10				
3	) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
4	) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	3 ) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	4 ) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	5 ) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		50	75	100				
	6 ) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan *(V.A.3)		50	80	100				
	7 ) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		25	50	100				
VI	Program Dukungan Manajemen						4.481.326	5.046.810	Seluruh Unit Utama/Eselon 1
B	Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								Sekretariat Jenderal
	1 Nilai Reformasi Birokrasi		94	96	98				
	2 Nilai Kinerja Anggaran		90	93	95				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pusat							
1	Nilai Reformasi Birokrasi BKPK*(VI.B.1)		35,5	35,8	36,1				
2	Nilai kinerja penganggaran BKPK*(VI.B.2)		89	90	91				

Sumber: dokumen Renstra Kemenkes Revisi 2020-2024

Rencana Kerja K/L (Renja K/L) pada tahun 2023, BKPK memiliki tiga Program dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, memiliki 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, memiliki 5 Kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan, Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan, Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, dan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan.  
Berdasarkan Dokumen Hasil Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka Perubahan Program dan Kegiatan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan pada 23-24 Maret 2022 disebutkan bahwa nomenklatur Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan baru diterapkan pada Rencana Kerja tahun 2023.
3. Program Dukungan Manajemen, dengan 1 Kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, untuk kegiatan ini sesuai perubahan organisasi BKPK.

## B. PAGU INDIKATIF

Pagu indikatif BKPK tahun 2023 telah dilakukan penelaahan dan reviu oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemenkes sebagai acuan pagu untuk penetapan pagu anggaran. Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direviu oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Setelahnya, dilakukan perbaikan sesuai dengan Catatan hasil review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : OS - Menguatnya surveilans yang adekuat  
 3. PROGRAM : Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	207.942.346,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	207.942.346,0
Total		207.942.346,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		462.506.729,0
01.01	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	
01.02	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	0	
01.03	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	
01.04	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	
Total			462.506.729,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Kebijakan Bidang Kesehatan	462.506.729,0

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
Total		462.506.729,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKATOR PENDANAAN TAHUN 2023											PRABAHAN KERUTUKAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	KMP	FDN	HSRAN	PM	SRSN	HR	TOTAL	2024	2025	2026
0022	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	197.459.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197.459.266,0	197.459.266,0	197.459.266,0	197.459.266,0
0034	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	104.982.574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.982.574,0	104.982.574,0	104.982.574,0	104.982.574,0
0025	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	11.220.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.220.390,0	11.220.390,0	11.220.390,0	11.220.390,0
0039	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	24.990.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.990.202,0	24.990.202,0	24.990.202,0	24.990.202,0
0037	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	33.814.297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.814.297,0	33.814.297,0	0,0	0,0
Total		462.506.729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462.506.729,0	462.506.729,0	462.506.729,0	462.506.729,0

Diartik 14 Juli 2022  
 Sekretaris Pembangunan Kesehatan



Anindya, M.Pham, MARS., Apt  
 NIP. 196803261994017004

### C. PAGU ALOKASI

Penetapan pagu alokasi anggaran dilaksanakan oleh BKPK dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Setelah melewati rangkaian review bersama Biro Perencanaan dan Anggaran serta Inspektorat Jenderal, dilanjutkan dengan review bersama Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan.

#### REKAP 2: PROGRAM K/L

#### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN  
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : OB - Menguatnya surveilans yang adekuat  
3. PROGRAM : Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	367.150.921,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	367.150.921,0
Total		367.150.921,0

#### 5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		623.615.856,0
01.01	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	
01.02	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	0	
01.03	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	
01.04	Terbangunnya tatakelola kerjasama Internasional yang efektif	1	
Total			623.615.856,0

#### 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Kebijakan Bidang Kesehatan	623.615.856,0
	Total	623.615.856,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PON	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	378.556.367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378.556.367,0	206.629.154,0	206.629.154,0	206.629.154,0
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	172.980.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.980.048,0	34.274.031,0	34.274.031,0	34.949.031,0
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	13.318.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.318.203,0	11.557.003,0	11.903.712,0	12.260.822,0
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	39.836.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.836.202,0	24.195.057,0	24.195.057,0	24.195.057,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PON	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
0837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	18.925.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.925.036,0	18.925.036,0	0,0	0,0
	Total	623.615.856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623.615.856,0	295.580.281,0	277.001.954,0	278.004.094,0

Jakarta, 30 Desember 2022

Pl. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Dr. L. Hika Andakata, Apt., M.Pharm, MARS  
N.P. 195802251994032004

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Organisasi Unit Eselon I Badan Litbang Kesehatan menjadi Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Organisasi, yang berakibat pada perubahan Program dan Kegiatan secara menyeluruh. Tahun 2023, BKPK telah menyesuaikan terkait sasaran, indikator, target dan anggaran sesuai perubahan organisasi.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT BKPK Tahun 2023 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT BKPK tahun 2023 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN  
KRISNA RENJA BKPK 2023

**REKAP 2: PROGRAM K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN  
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 08 - Menguatnya surveilans yang adekuat  
 3. PROGRAM : Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

**4. PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	367.150.921,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	367.150.921,0
Total		367.150.921,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		623.615.856,0
01.01	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	
01.02	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	0	
01.03	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	
01.04	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	
Total			623.615.856,0

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Kebijakan Bidang Kesehatan	623.615.856,0
Total		623.615.856,0

#### 7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	378.556.367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378.556.367,0	206.629.154,0	206.629.154,0	206.629.154,0
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	172.980.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.980.048,0	34.274.031,0	34.274.031,0	34.949.031,0
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	13.318.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.318.203,0	11.557.003,0	11.903.712,0	12.260.822,0
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	39.836.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.836.202,0	24.195.057,0	24.195.057,0	24.195.057,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	18.925.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.925.036,0	18.925.036,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>623.615.856,0</b>	<b>0,0</b>	<b>623.615.856,0</b>	<b>295.580.281,0</b>	<b>277.001.954,0</b>	<b>278.034.064,0</b>								

Jakarta, 30 Desember 2022

Pt. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Dr. L. Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm, MARS.  
NIP. 196802261994032004

## DAFTAR KONTRIBUTOR

### Tim Pengarah:

1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran

### Tim Penyusun:

1. Adid Muqtadiroh
2. Sari Ramadhani
3. Tri Ramadhany
4. Nazila Zubair
5. Dyah Rahmayanti
6. Ani Mardhiyani
7. Ervina Agustin Rantauwati
8. Martin Lasty Marbun
9. Titin Delia
10. Dion Sitanggang

### Desain dan Cover:

Febri Aryanto